

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 291 tentang DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga legislatif perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 106 anggota dewan yang telah terpilih melalui pemilihan umum setiap periode lima tahun sekali. DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki pimpinan sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemenang jumlah kursi dan suara terbanyak.

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang sedang menjabat saat ini merupakan hasil dari pemilihan umum terbaru, yakni periode tahun 2024-2029 yang dilantik pada 26 Agustus 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Susunan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 terdiri dari 11 partai politik dengan partai politik pemilik kursi terbanyak, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 18 kursi. Tugas-tugas DPRD Provinsi DKI Jakarta, antara lain menyelenggarakan hal-hal seputar legislatif daerah meliputi anggaran, pengawasan, dan penetapan kebijakan atau peraturan daerah. Selain itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD.
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.
- 3) Penyelenggaraan kesekretariatan DPRD.
- 4) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- 5) Fasilitasi rapat anggota DPRD.

- 6) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- 7) Fasilitasi pengangkatan, pelantikan, pemberhentian dalam dan dari jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta serah terima jabatan pada rapat paripurna DPRD.
- 8) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan Sekretariat DPRD;
- 9) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Sekretariat DPRD.
- 10) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. Oleh karena itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan 106 orang membentuk 5 komisi. Berikut daftar komisi beserta ketua sebagai berikut:

- 1) Komisi A Bidang Pemerintahan (Ketua: Ima Mahdiah fraksi PDI-P)
- 2) Komisi B Bidang Perekonomian (Ketua: Basri Baco fraksi Golkar)
- 3) Komisi C Bidang Keuangan (Ketua: H. Khoirudin fraksi PKS)
- 4) Komisi D Bidang Pembangunan (Ketua: Wibi Andrino fraksi Nasdem)
- 5) Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat (Ketua: Hj. Rany Mauliani fraksi Gerindra)

DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki visi yang berbunyi “Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang profesional, transparan dan akuntabilitas dalam memfasilitasi tugas DPRD Provinsi DKI Jakarta” dan misi yang berbunyi “Memberikan pelayanan terhadap DPRD Provinsi DKI Jakarta”.

Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh beberapa alat kelengkapan dalam mencapai hasil kinerja kelembagaan dalam pembuatan kebijakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 302 ayat (1) tentang Alat Kelengkapan DPRD Provinsi, terdiri dari:

a. Pimpinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 303 ayat (1), DPRD Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan sebanyak 106 orang terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi (dan suara) terbanyak secara berurutan. Pimpinan DPRD memiliki tugas untuk menjalankan seluruh keputusan dalam sidang paripurna yang telah dilaksanakan.

b. Komisi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 305 ayat (1) huruf b, DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 komisi, yakni Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian), Komisi C (Bidang Keuangan), Komisi D (Bidang Pembangunan), dan Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat). Komisi DPRD memiliki tugas sesuai bidangnya masing-masing.

c. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD Provinsi yang bersifat tetap dan dibentuk di awal periode masa jabatan keanggotaan. Susunan Badan Musyawarah berdasarkan perimbangan jumlah anggota DPRD secara proporsional dan unsur pimpinan DPRD dari setiap fraksi dan komisi yang ada. Badan Musyawarah DPRD memiliki tugas untuk mengatur dan mempersiapkan rapat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

d. Badan Legislasi (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)

Badan Legislasi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD Provinsi yang bersifat tetap dan dibentuk di awal periode masa jabatan keanggotaan. Susunan Badan Legislasi berdasarkan perimbangan jumlah anggota DPRD secara proporsional dan unsur pimpinan DPRD dari setiap fraksi dan komisi yang ada. Badan Legislasi DPRD memiliki tugas untuk merancang, mengoreksi, menyempurnakan dan memastikan

kembali terkait Peraturan Daerah yang telah dibuat untuk diteruskan ke Pimpinan DPRD.

e. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD Provinsi yang bersifat tetap dan dibentuk di awal periode masa jabatan keanggotaan. Susunan Badan Anggaran berdasarkan perimbangan jumlah anggota DPRD secara proporsional dan unsur pimpinan DPRD dari setiap fraksi dan komisi yang ada. Badan Anggaran DPRD memiliki tugas untuk mempersiapkan dan membahas pedoman penyusunan rancangan APBD bersama Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

f. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD Provinsi yang bersifat tetap dan dibentuk di awal periode masa jabatan keanggotaan. Susunan Badan Kehormatan berdasarkan perimbangan jumlah anggota DPRD secara proporsional dan unsur pimpinan DPRD dari setiap fraksi dan komisi yang ada. Badan Kehormatan DPRD memiliki tugas untuk mengawasi, menyelidiki dan menindaklanjuti anggota DPRD yang melakukan pelanggaran.

g. Fraksi (Alat Kelengkapan Lain)

Fraksi memegang peranan penting dalam keberjalanan para anggota dewan melalui partai politik masing-masing sebagai tempat untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi legislatif secara keseluruhan. DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki 10 fraksi atau partai politik.

2.1.1 Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta

Pada tanggal 9 April 2014 telah dilaksanakan pemilihan umum legislatif DKI Jakarta secara serentak. Berdasarkan data resmi dari KPU DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2014 terdapat sebanyak 9.603.417 jiwa. Daftar pemilih tetap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 7.232.269 dengan rincian yang menggunakan hak pilih sebanyak 4.808.198 dan tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak

2.424.071. Kep. Seribu menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat partisipasi pemilih tertinggi sebanyak 14.440 dengan persentase 72.53% dan Jakarta Pusat menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat partisipasi pemilih terendah sebanyak 499.847 dengan persentase 64.40%.

Sedangkan, pemilihan umum legislatif DKI Jakarta tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 secara serentak. Berdasarkan data resmi dari KPU DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2014 terdapat sebanyak 10.562.088 jiwa. Daftar pemilih tetap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8.109.835 dengan rincian yang menggunakan hak pilih sebanyak 6.355.200 dan tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.754.635. Kep. Seribu menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat partisipasi pemilih tertinggi sebanyak 17.526 dengan persentase 82% dan Jakarta Utara menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat partisipasi pemilih terendah sebanyak 1.002.592 dengan persentase 76.52%.

Pada daerah pemilihan umum Provinsi DKI Jakarta telah diatur melalui keputusan KPU Nomor 274/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan 2019 yang menetapkan 10 Daerah Pemilihan yang terbagi menjadi Dapil DKI Jakarta 1-10. Dapil 1 dimulai dari seluruh bagian wilayah Jakarta Pusat, Dapil 2 dan 3 wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara, Dapil 4 hingga 6 wilayah Jakarta Timur, Dapil 7 dan 8 wilayah Jakarta Selatan, Dapil 9 dan 10 wilayah Jakarta Barat.

Tabel 2.1
Daftar Persebaran Wilayah dan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta

Daftar Daerah Pemilihan (Dapil)	Wilayah Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota/Kecamatan)	Jumlah Kursi	
		Tahun 2014	Tahun 2019
Dapil 1	Jakarta Pusat	12	12
Dapil 2	Kabupaten Kepulauan Seribu Jakarta Utara A 1. Kecamatan Koja 2. Kecamatan Cilincing 3. Kecamatan Kelapa Gading	9	9
Dapil 3	Jakarta Utara B 1. Kecamatan Penjaringan 2. Kecamatan Pademangan 3. Kecamatan Tanjung Priok	9	9
Dapil 4	Jakarta Timur A 1. Kecamatan Cakung 2. Kecamatan Pulogadung 3. Kecamatan Matraman	10	10
Dapil 5	Jakarta Timur B 1. Kecamatan Duren Sawit 2. Kecamatan Jatinegara 3. Kecamatan Kramatjati	10	10
Dapil 6	Jakarta Timur C 1. Kecamatan Makasar 2. Kecamatan Cipayung 3. Kecamatan Ciracas 4. Kecamatan Pasar Rebo	10	10
Dapil 7	Jakarta Selatan A	10	10

	1. Kecamatan Setiabudi 2. Kecamatan Kebayoran Baru 3. Kecamatan Cilandak 4. Kecamatan Kebayoran Lama 5. Kecamatan Pesanggrahan		
Dapil 8	Jakarta Selatan B 1. Kecamatan Tebet 2. Kecamatan Pancoran 3. Kecamatan Mampang Prapatan 4. Kecamatan Pasar Minggu 5. Kecamatan Jagakarsa	10	12
Dapil 9	Jakarta Barat A 1. Kecamatan Tambora 2. Kecamatan Cengkareng 3. Kecamatan Kalideres	12	12
Dapil 10	Jakarta Barat B 1. Kecamatan Taman Sari 2. Kecamatan Grogol Petamburan 3. Kecamatan Palmerah 4. Kecamatan Kebon Jeruk 5. Kecamatan Kembangan	12	12

Berdasarkan hasil perolehan suara KPU, DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2014-2019 dan 2019-2024 memiliki jumlah anggota dewan sebanyak 106 orang dan sebanyak 10 partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menduduki urutan paling atas

dengan jumlah perolehan kursi paling banyak selama dua periode berturut-turut dibanding dengan partai politik lainnya, yakni pada periode 2014-2019 mendapatkan sebanyak 28 kursi dan periode 2019-2024 mendapatkan sebanyak 25 kursi. Walaupun mengalami penurunan jumlah kursi dari periode 2014 ke 2019, namun PDI-P tetap menjadi partai politik yang paling banyak mendapatkan jumlah kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta dibandingkan partai politik lainnya.

Tabel 2.2
Perolehan Jumlah Kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan
Partai Politik

Partai Politik	Jumlah Kursi	
	Tahun 2014	Tahun 2019
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	28	25
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	15	19
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11	16
Partai Demokrat (PD)	10	10
Partai Amanat Nasional (PAN)	2	9
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	8
Partai Nasional Demokrat (NasDem)	5	7
Partai Golongan Karya (Golkar)	9	6
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	5
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10	1
Partai Hanura	10	0
Jumlah	106	106

2.1.2 Keterwakilan Perempuan DPRD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil perolehan suara KPU, DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2014-2019 memiliki jumlah kursi anggota dewan perempuan sebanyak 19 (18%) kursi dan periode tahun 2019-2024 memiliki sebanyak 23 (21%) kursi dari total sebanyak 106 kursi. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat kenaikan yang signifikan dalam keterwakilan perempuan dari periode tahun 2014 hingga tahun 2019 di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.3
Perbandingan Caleg Perempuan Terpilih DPRD Provinsi DKI Jakarta

Partai Politik	Tahun 2014			Tahun 2019		
	Jumlah Kursi Caleg Perempuan	Jumlah Kursi Partai	%	Jumlah Kursi Caleg Perempuan	Jumlah Kursi Partai	%
PDI-P	10	28	39	11	25	44
Gerindra	4	15	27	2	19	11
PKS	2	11	19	2	16	13
Demokrat	2	10	20	4	10	40
PAN	0	2	0	1	9	12
PSI	0	0	0	3	8	38
NasDem	0	5	0	0	7	0
Golkar	0	9	0	0	6	0
PKB	0	6	0	0	5	0
PPP	1	10	10	0	1	0
Hanura	0	10	0	0	0	0
Jumlah	19	106	18%	23	106	21%

Tabel 2.4
Perbandingan Perolehan Jumlah Kursi Caleg Perempuan Terpilih
DPRD Provinsi DKI Jakarta

Partai Politik	Perolehan Kursi Caleg Perempuan		Perubahan
	Tahun 2014	Tahun 2019	
PDI-P	10	11	Naik
Gerindra	4	2	Turun
PKS	2	2	Tetap
Demokrat	2	4	Naik
PAN	0	1	Naik
PSI	0	3	Naik
NasDem	0	0	Tetap
Golkar	0	0	Tetap
PKB	0	0	Tetap
PPP	1	0	Turun
Hanura	0	0	Tetap
Jumlah	19	23	Naik

Tabel 2.5
Persentase Perolehan Jumlah Kursi Caleg Perempuan Terpilih
DPRD Provinsi DKI Jakarta

Partai Politik	% Kursi Caleg Perempuan		Perubahan
	Tahun 2014	Tahun 2019	
PDI-P	39%	44%	Naik
Gerindra	27%	11%	Turun
PKS	19%	13%	Turun
Demokrat	20%	40%	Naik
PAN	0%	12%	Naik

PSI	0%	38%	Naik
NasDem	0%	0%	Tetap
Golkar	0%	0%	Tetap
PKB	0%	0%	Tetap
PPP	10%	0%	Turun
Hanura	0%	0%	Tetap

Berdasarkan data pada tabel diatas, secara keseluruhan PDI-P menunjukkan sebagai partai politik yang memiliki konsistensi peningkatan dalam perolehan jumlah kursi anggota dewan perempuan terbanyak di DPRD Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan partai politik lainnya. Tercatat bahwa pada periode tahun 2014 PDI-P memiliki jumlah anggota dewan perempuan sebanyak 10 (39%) orang dan periode tahun 2019 sebanyak 11 (44%) orang.

Urutan kedua partai dengan konsistensi peningkatan jumlah anggota dewan perempuan terbanyak adalah Partai Demokrat pada periode tahun 2014 sebanyak 2 (20%) orang dan tahun 2019 sebanyak 4 (40%) orang. Disusul dengan Partai Amanat Nasional pada periode tahun 2019 sebanyak 1 (12%) orang dari periode sebelumnya yang tidak ada sama sekali. Kemudian, PSI sebagai partai pendatang di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2019 memiliki sebanyak 3 (38%) orang. Sedangkan, partai yang mengalami penurunan jumlah anggota dewan perempuan dari periode tahun 2014 hingga tahun 2019 adalah Partai Gerindra, PKS dan PPP.

Tabel 2.6
Daftar Caleg Perempuan PDI-P Terpilih DPRD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2014 & Tahun 2019

NO.	Tahun 2014			Tahun 2019		
	Nama	Dapil	Suara Sah	Nama	Dapil	Suara Sah
1.	Ellyzabeth CH. Mailoa	DKI 1	7.814	Wa Ode Herlina	DKI 1	8.551
2.	Meity Magdalena Ussu	DKI 2	7.563	Agustina H	DKI 2	19.570
3.	Hj. Ida Mahmudah	DKI 3	14.637	Hj. Ida Mahmudah	DKI 3	17.887
4.	Hj. Indrawati Dewi	DKI 7	7.702	Hj. Indrawati Dewi	DKI 7	10.203
5.	Yuke Yurike, S.T., M.M.	DKI 8	8.962	Yuke Yurike, S.T., M.M.	DKI 8	12.109
6.	Sereida Tambunan, S.I.P.	DKI 8	8.124	Ong Yenny	DKI 9	11.962
7.	Ong Yenny	DKI 9	18.931	Lauw Siegvrieda	DKI 9	30.938
8.	Lauw Siegvrieda	DKI 9	15.264	Cinta Mega, S.H.	DKI 9	12.491
9.	Cinta Mega, S.H.	DKI 9	13.245	Ima Mahdiah	DKI 10	30.591
10.	Merry Hotma, S.H.	DKI 10	36.099	Merry Hotma, S.H.	DKI 10	24.803
11.				Dr. Stephanie Octavia	DKI 10	18.000

Berdasarkan data pada tabel daftar caleg perempuan PDI-P terpilih, pada pemilu legislatif periode tahun 2014 terdapat tiga caleg perempuan terpilih yang mendapatkan paling banyak perolehan suara adalah Merry Hotma, Ong Yenny dan Lauw Siegvrieda. Merry Hotma mendapatkan jumlah suara sah sebanyak 36.099 suara, Ong Yenny sebanyak 18.931 suara dan Lauw Siegvrieda sebanyak 15.264 suara.

Sedangkan, pada pemilu legislatif periode tahun 2019 adalah Lauw Siegvrieda, Ima Mahdiah dan Merry Hotma. Lauw Siegvrieda mendapatkan jumlah suara sah sebanyak 30.938 suara, Ima Mahdiah sebanyak 30.591 suara dan Merry Hotma sebanyak 24.803 suara. Secara keseluruhan, caleg perempuan PDI-P terpilih yang mendapatkan jumlah suara paling banyak selama dua periode berturut-turut dan dapat juga disebut dengan caleg petahana adalah Lauw Siegvrieda dan Merry Hotma.

2.2 Profil Wa Ode Herlina

Wa Ode Herlina, S.I.Kom., MM merupakan salah satu anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 dan periode 2024-2029. Wa Ode Herlina lahir di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Mei 1967. Pada periode 2019-2024, Wa Ode Herlina menjabat sebagai anggota di bagian Badan Anggaran dan sebagai sekretaris di Komisi B. Sedangkan, pada periode 2024-2029, Wa Ode Herlina menjabat sebagai anggota di bagian Badan Musyawarah dan Komisi B.

Gambar 2.1

Foto Wa Ode Herlina



Sumber : <https://dprd-dkijakartaprof.go.id/profile/wa-ode-herlina/>

Wa Ode Herlina mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 1 pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024 yang mencakup wilayah Kota Jakarta Pusat. Wa Ode Herlina merupakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Selain menduduki jabatan struktural di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wa Ode Herlina juga menduduki jabatan struktural lainnya sebagai Ketua DPC PDI PERJUANGAN Jakarta Pusat.

Latar belakang karir Wa Ode Herlina sebagai anggota dewan bermula dari seringnya berdiskusi dengan Ayahnya mengenai politik, sehingga dari kegiatan tersebut Wa Ode mulai tertarik dengan hal-hal politik. Pada pemilihan umum tahun 2004 menjadi kali pertama Wa Ode mencalonkan diri sebagai anggota dewan, namun pada kesempatan tersebut Wa Ode belum berhasil. Selanjutnya, Wa Ode mengikuti kembali pemilihan umum legislatif tahun 2009 dan 2014, akan tetapi Wa Ode masih belum beruntung untuk memenangkan kontestasi. Pada pemilihan umum tahun 2019, Wa Ode mencoba kembali untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan dan di kesempatan inilah Wa Ode berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Wa Ode melakukan blusukan yang tersebar di 401 titik pertemuan, 44 kelurahan, dan 8 kecamatan selama kurang

lebih 9 bulan dan berhasil meraih sebanyak 8.851 suara, dan duduk di kursi DPRD DKI Jakarta pada tahun 2019.

Walaupun Wa Ode sempat mengalami beberapa kegagalan dalam mencalonkan diri sebagai anggota dewan, hal tersebut tidak membuat Wa Ode menyerah karena Wa Ode memiliki niat dan semangat yang besar untuk membantu dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Hal tersebut juga yang digunakan sebagai modal utama untuk maju ke pemilihan umum legislatif karena Wa Ode tidak memiliki banyak cukup uang untuk berkampanye, mengingat Wa Ode hanya berprofesi sebagai tukang jahit. Wa Ode hanya melakukan kampanye langsung kepada masyarakat melalui *door to door* dengan bantuan keluarga dan relawan serta diiringi dengan tekad dan komitmen yang kuat. Dari total 23 perempuan politisi di DPRD DKI Jakarta pada periode 2019-2024, 11 diantaranya berasal dari PDI-P termasuk Wa Ode Herlina. Jumlah perempuan politisi pada periode ini sudah melebihi ketentuan Komisi Pemilihan Umum, yaitu sebanyak 30 persen.

2.3 Profil Yuke Yurike

Hj. Yuke Yurike, ST., MM merupakan salah satu anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019, periode 2019-2024 dan periode 2024-2029. Yuke Yurike lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 22 Februari 1975. Pada periode 2019-2024, Yuke Yurike menjabat sebagai anggota di bagian Badan Anggaran dan Komisi D. Sedangkan, pada periode 2024-2029, Yuke Yurike menjabat sebagai anggota di bagian Badan Anggaran dan sebagai ketua di Komisi D. Yuke Yurike telah menempuh pendidikan Sarjana S1 di Universitas Indonesia (UI) dengan jurusan Teknik Mesin dan Magister S2 di Universitas Prasetya Mulya dengan jurusan Manajemen.

Gambar 2.2

Foto Yuke Yurike



Sumber : <https://dprd-dkijakartaprof.go.id/profile/yuke-yurike-st-mm/>

Yuke Yurike mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 8 pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan 2024 yang mencakup sebagian wilayah Kota Jakarta Selatan, yakni Kecamatan Tebet, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Jagakarsa. Yuke Yurike merupakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Selain menduduki jabatan struktural di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike juga menduduki jabatan struktural lainnya sebagai Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan. Bendahara Umum HIPMI Jaya, Wakomtap KADIN Indonesia Bidang UKM, Wabendum DPP KNPI, Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat PD IX DKI Jakarta GM FKPP, Pengurus PB PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia) Cabang Renang Indah, dan Ketua Ikatan Alumni Teknik Mesin Universitas Indonesia (ILUSIN UI).

Yuke Yurike merupakan putri dari seorang ayah pensiunan TNI dan juga anggota DPR RI, yakni Mayor Jenderal TNI (Purn.) Adang Ruchiatna anggota DPR RI komisi VIII periode 2009-2014. Awalnya, Yuke tidak memiliki ketertarikan pada hal-hal politik termasuk cita-cita untuk menjadi seorang anggota dewan. Namun, dengan sikap kritis yang dimiliki oleh Yuke terhadap

pemerintah muncul kepeduliannya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Saat SMA, Yuke sempat pindah ke sekolah yang berbeda sebanyak 3 kali, yaitu SMA Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Samarinda, dan SMA Negeri 8 Jakarta. Kemudian, Yuke melanjutkan pendidikan dengan berkuliah di Universitas Indonesia jurusan teknik mesin program studi teknik industri, dan S2 di Universitas Prasetya Mulya program Magister Manajemen.

Perjalanan karir politik Yuke bermula setelah lulus kuliah dari Universitas Indonesia, Yuke dikenalkan oleh sang Ayah dengan salah satu anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yakni Maruarar Sirait. Sejak pengenalan itu, Yuke mulai bergabung dengan PDI-P dan Taruna Merah Putih. Selain itu, Yuke masuk struktur Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan. Kemudian, pada tahun 2009 Yuke mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat 7 yang meliputi wilayah Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Namun, pada kesempatan pertama tersebut Yuke belum beruntung memenangkan kontestasi. Setelah mengalami kegagalan dalam pemilihan umum legislatif sebelumnya, pada tahun 2012 Yuke tergabung dalam kampanye Pil-Gub DKI Jakarta untuk Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Setelah Yuke mendapatkan ilmu dan pengalaman yang banyak dari Pil-Gub tersebut, Yuke kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di dapil 8 Jakarta Selatan. Akhirnya, pada pemilu tahun 2014 untuk pertama kalinya Yuke berhasil memenangkan kontestasi legislatif di DPRD DKI Jakarta dengan perolehan jumlah suara sebanyak 8.962 suara. Dari total 23 perempuan politisi di DPRD DKI Jakarta pada periode 2019-2024, 11 diantaranya berasal dari PDI-P termasuk Yuke Yurike. Jumlah perempuan politisi pada periode ini sudah melebihi ketentuan Komisi Pemilihan Umum, yaitu sebanyak 30 persen.